

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2016–2019

Lutfi Afnan

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email: lutfiafnan667@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the financial performance of income and expenditure of the Investment and One-Stop Service Office of Demak Regency for the 2016-2019 period. This research uses a type of quantitative descriptive research. The data source used is secondary data in the form of budget realization reports obtained from the Investment and One Stop Services Office of Demak Regency. The data analysis technique used is the analysis of income variance, income growth, degree of decentralization, financial independence ratio, local original revenue effectiveness ratio, expenditure variance analysis, expenditure growth, expenditure compatibility ratio, and expenditure efficiency ratio. The results of this study indicate that the performance of the revenue budget in 2016-2019 seen from the analysis of income variance is in the unfavorable category with an average of 98.21 percent, the income growth analysis is considered positive with an average of 63.72 percent, the degree of decentralization is in very high criteria. good with an average of 100 percent, the ratio of financial independence in the category of truly capable of being independent is indicated by an infinite percentage, the ratio of the effectiveness of local revenue in the category of quite effective with an average of 98.21 percent. While the performance of the expenditure budget is seen from the analysis of variance in the good category with an average of 94.84 percent, the growth of expenditure in the category which is quite volatile, the analysis of the compatibility of spending in the matching category with an average operating expenditure of 91.65 percent and capital expenditure of 8.36 percent, the ratio of spending efficiency in the efficient category with an average of 94.83 percent

Keywords: Performance, Realization, Regional Revenue and Expenditure Budget, Budget Realization Report

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan dan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis varian pendapatan, pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran pendapatan pada tahun 2016-2019 dilihat dari analisis varian pendapatan dalam kategori kurang baik dengan rata-rata 98,21 persen, analisis pertumbuhan pendapatan dinilai positif dengan rata-rata 63,72 persen, derajat desentralisasi dalam kriteria sangat baik dengan rata-rata 100 persen, rasio kemandirian keuangan dalam kategori sudah benar-benar mampu mandiri ditunjukkan dengan persentase tak tebingga, rasio efektifitas pendapatan asli daerah dalam kategori cukup efektif dengan rata-rata 98,21 persen. Sedangkan kinerja anggaran belanja dilihat dari analisis varian belanja dalam kategori baik dengan rata-rata 94,84 persen, pertumbuhan belanja dalam kategori yang cukup fluktuatif, analisis keserasian belanja dalam kategori serasi dengan rata-rata belanja operasi 91,65 persen dan belanja modal sebesar 8,36 persen, rasio efisiensi belanja dalam kategori efisien dengan rata-rata 94,83 persen.

Kata Kunci: Kinerja, Realisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran

Pendahuluan

Kesadaran masyarakat atas penyelenggaraan administrasi publik semakin meningkat, hal tersebut memicu tumbuhnya gejala yang berakar pada ketidakpuasan. Perhatian masyarakat atas kinerja instansi pemerintah kini semakin banyak. Seringkali masyarakat menilai organisasi sektor publik menjadi sarang inefisiensi, sumber kebocoran dana serta institusi yang selalu merugi (Hasbi, 2021). Saat ini organisasi sektor publik sedang mengalami tekanan untuk melakukan efisiensi dalam memperhitungkan pembiayaan di bidang sosial dan ekonomi, serta memperhatikan dampak-dampak negatif dari kegiatan yang dilakukannya. Masyarakat menuntut lembaga-lembaga sektor publik untuk melakukan transparansi serta akuntabilitas

publik. Tuntutan tersebut sesuai dengan pasal 283 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang digunakan sebagai dasar dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu dilakukannya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan, efektif, efisien, ekonomis, bertanggungjawab, serta taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu perubahan yang mendasar atas sistem lama yang serba sentralis, dimana pemerintah pusat amat kuat dalam memutuskan suatu kebijakan. Paradigma baru tersebut mengharuskan membuat suatu metode yang sanggup mengurangi depedensi atau bahkan menghilangkan dependensi pemerintah daerah atas pemerintah pusat, serta mampu menguatkan daerah agar sanggup bersaing baik secara provinsial, nasional maupun internasional (Rukayah, 2017). Untuk menjawab paradigma baru tersebut, maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya, yang dimaksudkan agar suatu daerah mampu membiayai serta mengurus sendiri rumah tangganya agar efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Situasi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran kinerja tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibanding dengan yang telah direncanakan. Pemublikasian laporan realisasi anggaran oleh pemerintah daerah akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat, karena dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah (Iswanaji et al., 2021). Laporan realisasi anggaran lebih

diprioritaskan dibandingkan dengan neraca, dikarenakan laporan realisasi anggaran merupakan kategori laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dibuat sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional, serta laporan arus kas. Pembaca laporan dapat membuat suatu analisis mengenai kinerja keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, serta analisis pembiayaan berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut (Sari, Prasetyoningrum, & Hartono, 2020).

Kabupaten Demak merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian dari SKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Anggaran sektor publik merupakan alat akuntabilitas atas penyelenggaraan anggaran publik, serta pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2009). Anggaran juga merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin kesinambungan, serta mengarahkan perkembangan sosial ekonomi. Anggaran merupakan suatu rencana tertulis yang dinyatakan secara kuantitatif atas kegiatan suatu organisasi yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (Nafarin, 2012).

Karakteristik anggaran adalah sebagai berikut (Bastian, 2010):

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan moneter serta satuan non

moneter.

2. Umumnya anggaran mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.
3. Komitmen manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan tercantum di dalam anggaran.
4. Usulan anggaran dari penyusun anggaran telah disetujui oleh pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi darinya.
5. Sekali disusun, hanya dalam kondisi tertentu anggaran dapat diubah.

Pentingnya anggaran sektor publik dikarenakan (Mardiasmo, 2009):

- a. Anggaran menjadi alat bagi pemerintah untuk menjamin kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengarahkan pembangunan ekonomi nasional.
- b. Anggaran diperlukan sebab terbatasnya sumber daya yang ada, sedangkan kebutuhan serta kegiatan masyarakat terus berkembang dan tidak terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya.
- c. Anggaran publik merupakan instrumen atas pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik. Maka dari itu anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang disusun secara terstruktur yang di dalamnya memuat informasi realisasi pendapatan, belanja serta pembiayaan selama periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, mengindikasikan derajat pencapaian sasaran-sasaran yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara eksekutif dengan legislative (Awwaliyah,

Agriyanto, & Farida, 2019).

Elemen yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran (Mahmudi, 2019): Pendapatan (meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah), Belanja (meliputi: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga), Belanja Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan (meliputi: Penerimaan Pembiayaan dan Pemngeluaran Pembiayaan), serta SiLPA/SiKPA.

Kinerja merupakan suatu gambaran perihal tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan organisasi (Megarani, Warno, & Fauzi, 2019). Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang digunakan untuk mendokumentasikan serta menilai pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan strategi, sasaran, dan tujuan sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi, serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mahsun, 2009).

Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2009).

Melalui laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan analisis pendapatan daerah antara lain berupa (Mahmudi, 2019):

Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan

1. Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, meliputi: pertumbuhan pendapatan PAD, pertumbuhan pajak daerah, pertumbuhan retribusi daerah, pertumbuhan pendapatan

transfer.

Menghitung rasio keuangan, meliputi: rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman, serta rasio utang terhadap pendapatan (Nafi', 2019).

Dari laporan realisasi anggaran juga dapat dilakukan analisis kinerja belanja daerah antara lain berupa (Mahmudi, 2019).

- a. Analisis varians (selisih) belanja
- b. Analisis pertumbuhan belanja
- c. Analisis keserasian belanja, meliputi: analisis belanja per fungsi terhadap total belanja, analisis belanja operasi terhadap total belanja, analisis belanja modal terhadap total belanja, analisis belanja langsung dan tidak langsung.
- d. Rasio efisiensi belanja
- e. Rasio belanja terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan rasio keuangan yaitu rasio Efektivitas dan rasio Efisiensi. Dimana Rasio Efektivitas dapat diukur dengan (Mahmudi, 2019).

1. Analisis Kinerja Pendapatan

a. Varian Pendapatan

Rumus menghitung varian pendapatan:

$$\text{Varian Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

Pemerintah daerah dikatakan mempunyai kinerja yang baik, bilamana mampu mendapatkan pendapatan yang melebihi dari jumlah yang dianggarkan (Mahmudi, 2019).

b. Pertumbuhan Pendapatan

Rumus menghitung Pertumbuhan Pendapatan (PP):

$$\text{PP Th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

Pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat (Mahmudi, 2019).

c. Derajat Desentralisasi

Rumus menghitung derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2019).

d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus menghitung rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Tranfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2019).

e. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rumus menghitung efektivitas PAD:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	<75

Sumber: (Mahmudi, 2019)

f. Analisis Kinerja Belanja

1. Varian Belanja

Rumus menghitung varians belanja:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan (Mahmudi, 2019).

g. Pertumbuhan Belanja

Rumus menghitung Pertumbuhan Belanja (PB):

$$PB \text{ Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Thn } (t-1)} \times 100\%$$

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi (Mahmudi, 2019).

h. Keserasian Belanja

2. Belanja operasi terhadap total belanja

Rumus menghitung rasio belanja operasi terhadap total belanja:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 (Mahmudi, 2019).

3. Belanja modal terhadap total belanja

Rumus menghitung rasio belanja modal terhadap total belanja:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2019).

i. Rasio Efisiensi Belanja

Rumus menghitung efisiensi belanja:

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Varian Pendapatan

Tabel 2. Perhitungan Varian Pendapatan DPMPTS Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	Persentase (%)
2016	6.065.000.000	4.651.442.146	-1.413.557.854	76,70
2017	4.358.000.000	2.163.321.285	-2.194.678.715	49,64
2018	2.259.335.000	2.946.621.654	687.2286.654	130,42
2019	8.060.000.000	10.966.391.588	2.906.391.588	136,06
Rata-rata			-3.639.581,75	98,21

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Diolah: 2020

Jika dilihat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, realisasi pendapatan yang memiliki selisih lebih yaitu pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 memiliki selisih kurang. Persentase selisih pendapatan tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 136,06 persen, sedangkan persentase terendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 49,64 persen.

1. Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 3. Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan DPMPTSP Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2016	4.651.442.146	-	
2017	2.163.321.285	(53,50)	Negatif
2018	2.946.621.654	36,21	Positif
2019	10.966.391.588	272,17	Positif

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Diolah: 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di DPMPTSP Kabupaten Demak tahun anggaran 2016-2019 terus mengalami pertumbuhan PAD, meskipun pada tahun 2017 PAD sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar -53,50 persen. Akan tetapi pada tahun 2018 pertumbuhan PAD mengalami kenaikan sebesar 36,21 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 272,17 persen.

2. Derajat Desentralisasi

Tabel 4 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi DPMPTSP Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kinerja
-------	-----------------------------	------------------------------	-----------	---------

2016	4.651.442.146	4.651.442.146	100	Sangat Baik
2017	2.163.321.285	2.163.321.285	100	Sangat Baik
2018	2.946.621.654	2.946.621.654	100	Sangat Baik
2019	10.966.391.588	10.966.391.588	100	Sangat Baik

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Diolah: 2020

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dikatakan derajat desentralisasi DPMPTSP kabupaten Demak dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sangat baik, hasil tersebut ditunjukkan dengan rasio derajat desentralisasi dari tahun 2016 sampai 2019 sebesar 100 persen.

3. Rasio Kemandirian Keuangan

Tabel 5. Perhitungan Rasio Kemandirian DPMPTSP Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer dan Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2016	4.651.442.146	0	Tak Terhingga
2017	2.163.321.285	0	Tak Terhingga
2018	2.946.621.654	0	Tak Terhingga
2019	10.966.391.588	0	Tak Terhingga

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Diolah: 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Demak pada tahun 2016 sampai 2019 sudah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan rasio kemandirian yang diperoleh pada tahun 2016 sampai 2019 adalah tak terhingga.

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah DPMPTSP kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kinerja
2016	6.065.000.000	4.651.442.146	76,70	Kurang Efektif
2017	4.358.000.000	2.163.321.285	49,64	Tidak Efektif
2018	2.259.335.000	2.946.621.654	130,42	Sangat Efektif
2019	8.060.000.000	10.966.391.588	136,06	Sangat Efektif
Rata-rata			98,21	Cukup Efektif

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Diolah: 2020

Berdasarkan tersebut terlihat bahwa rasio efektivitas DPMPTSP kabupaten Demak fluktuatif. Rasio efektivitas dianggap baik bilamana bisa mendapat persentase setidaknya 100 persen. Pada tahun 2016 rasio efektivitas menunjukkan

angka 76,70 persen, hal ini menandakan bahwa realisasi PAD tidak mencapai target yang dianggarkan. Pada tahun 2017 realisasi PAD semakin tidak efektif, karena dalam perbandingan antara realisasi dengan anggaran menunjukkan angka 49,64 persen, masih sangat jauh untuk memenuhi syarat minimal 100 persen. Lain halnya dengan tahun 2018 dan 2019, realisasi PAD menunjukkan rasio yang sangat efektif, hal ini ditunjukkan rasio efektivitas pada tahun 2018 sebesar 130,42 persen dan pada tahun 2019 sebesar 136,06 persen. Jika dilihat secara keseluruhan dari tahun 2016 sampai 2019, dapat dikatakan rasio efektivitas cukup baik karena mencapai angka rata-rata sebesar 98,21 persen.

5. Analisis Kinerja Belanja

Tabel 7. Perhitungan Varian Belanja DPMPTSP Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	Persentase (%)
2016	4.580.773.000	4.422.331.690	-158.441.310	96,54
2017	5.120.301.000	4.766.058.697	-354.242.303	93,08
2018	4.762.834.500	4.577.963.549	-184.870.951	96,12
2019	5.476.669.750	5.126.306.869	-350.362.881	93,60
Rata-rata			-261.979.361,25	94,84

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Diolah: 2020

Berdasarkan tabel 7 pada tahun 2016 DPMPTSP kabupaten Demak merealisasikan 96,54 persen dari jumlah yang dianggarkan, tahun 2017 dari jumlah yang dianggarkan terealisasi sebesar 93,08 persen, tahun 2018 dari jumlah yang dianggarkan terealisasi sebesar 96,12 persen, kemudian pada tahun 2019 dari jumlah yang dianggarkan terealisasi sebesar 93,60 persen.

6. Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 8 Perhitungan Pertumbuhan Belanja DPMPTSP Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2016	4.422.331.690	-	
2017	4.766.058.697	7,77	Positif
2018	4.577.963.549	-3,95	Negatif
2019	5.126.306.869	11,98	Positif

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Diolah: 2020

Berdasarkan tabel 8 di atas, kinerja keuangan DPMPTSP kabupaten Demak fluktuatif. Hal ini ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan belanja pada tahun 2016-2017 sebesar 7,77 persen berkriteria positif, pada tahun 2017-2018 pertumbuhan belanja berkriteria negatif sebesar -3,95 persen dan pada tahun 2018-2019 pertumbuhan belanja kembali positif sebesar 11,98 persen. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,98 persen, sedangkan pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar -3,95 persen.

7. Analisis Keserasian Belanja

a. Belanja operasi terhadap total belanja

Tabel 9. Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja DPMPTSP Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Rasio Keserasian (%)
2016	4.422.331.690	3.873.730.690	87,60
2017	4.766.058.697	4.483.528.697	94,07
2018	4.577.963.549	4.300.274.049	93,93
2019	5.126.306.869	4.663.819.550	90,98
Rata-rata			91,65

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Diolah: 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 sebesar 87,60 persen dari total belanja DPMPTS kabupaten Demak digunakan untuk belanja operasi. Pada tahun 2017 DPMPTSP kabupaten Demak menggunakan 94,07 persen dari total belanja untuk belanja operasi. Pada tahun 2018 DPMPTSP kabupaten Demak menggunakan 93,93 persen dari total belanja untuk belanja operasi. Selanjutnya pada tahun 2019 DPMPTSP kabupaten Demak menggunakan 90,98 persen dari total belanja untuk belanja operasi. Secara keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 91,65 persen dari total belanja yang digunakan untuk belanja operasi.

b. Belanja modal terhadap total belanja

Tabel 10. Perhitungan Belanja Modal Terhadap Total Belanja DPMPTSP Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Keserasian (%)
2016	4.422.331.690	548.601.000	12,41
2017	4.766.058.697	282.530.000	5,93
2018	4.577.963.549	277.689.500	6,07
2019	5.126.306.869	462.487.319	9,02
Rata-rata			8,36

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Diolah: 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dari total belanja DPMPTSP kabupaten Demak, sebesar 12,41 persen digunakan untuk belanja modal. Pada tahun 2017 DPMPTSP kabupaten Demak menggunakan 5,93 persen dari total belanja untuk belanja modal. Pada tahun 2018 DPMPTSP kabupaten Demak menggunakan 6,07 persen dari total belanja untuk belanja modal. Kemudian pada tahun 2019 DPMPTSP kabupaten Demak menggunakan 9,02 persen dari total belanja untuk belanja modal. Secara keseluruhan rata-rata sebesar 8,36 persen dari total belanja yang digunakan untuk belanja modal.

c. Rasio Efisiensi Belanja

**Tabel 11. Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja
DPMPTSP Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-
2019**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kinerja
2016	4.580.773.000	4.422.331.690	96,54	Efisien
2017	5.120.301.000	4.766.058.697	93,08	Efisien
2018	4.762.834.500	4.577.963.549	96,12	Efisien
2019	5.476.669.750	5.126.306.869	93,60	Efisien
Rata-rata			94,84	Efisien

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, Diolah: 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa DPMPTSP kabupaten Demak tahun 2016 menggunakan 96,54 persen dari total anggaran belanja. Pada tahun 2017, dari total anggaran belanja digunakan sebesar 93,08 untuk belanja daerah, menurun sebesar 3,46 persen dari tahun 2016. Pada tahun 2018 DPMPTSP kabupaten Demak menggunakan anggaran sebesar 96,60 persen dari total anggaran belanja, meningkat sebesar 3,04 persen dari tahun 2017. Tahun 2019 menurun sebesar 2,52 persen menjadi 93,60 persen anggaran yang digunakan untuk belanja.

Kesimpulan

Secara umum Kinerja DPMPTSP kabupaten Demak tahun anggaran 2016-2019 pada aspek Belanja dapat dikategorikan baik. Berdasarkan analisis Varian Belanja, DPMPTSP kabupaten Demak selama empat tahun anggaran secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar 94,84 persen, artinya kinerja DPMPTSP kabupaten Demak dinilai baik. Dimana tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 DPMPTSP kabupaten Demak menggunakan anggaran kurang dari 100 persen. Berdasarkan hasil dari analisis pertumbuhan belanja, DPMPTSP kabupaten Demak secara keseluruhan pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, hal ini dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kenaikan dan penurunan disebabkan oleh faktor inflasi dan peningkatan terhadap sarana dan prasarana aparatur.

Berdasarkan hasil dari analisis keserasian belanja, secara keseluruhan DPMPTSP kabupaten Demak pada tahun 2016-2019 telah mengharmonisasikan belanja, ditunjukkan oleh proporsi belanja modal yang lebih kecil dari belanja operasi, yaitu rata-rata belanja operasi sebesar 91,65 persen sedangkan belanja modal sebesar 8,36 persen. Berdasarkan analisis efisiensi belanja, DPMPTSP kabupaten Demak pada tahun 2016-2019 bahwa keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisien, yaitu sebesar 94,83 persen. Artinya tidak terjadi pemborosan anggaran atau telah melakukan efisiensi belanja.

Daftar Pustaka

- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektror Publik*. Yogyakarta: CV Andi.
- Megarani, N., Warno, W., & Fauzi, M. (2019). The effect of tax planning, company value, and leverage on income smoothing practices in companies listed on Jakarta Islamic Index. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 139. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3733>
- Nafarin. (2012). *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan* (1nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rukayah, N. K. (2017, Juli). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, IV, `1-88.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, A. R., Prasetyoningrum, A. K., & Hartono, S. B. (2020). The effect of intellectual capital and networking on the organizational values of Islamic Boarding Schools (A case study on Khalaf Islamic Boarding Schools in Demak). *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(1), 69. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.5044>

- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- M.Zidny Nafi' Hasbi. (2021). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa. 1(2), 89–102.
- Santoso, S. W., Maryono dan Bagana, B. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabiliats Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers 2019*, ISSN: 2443-2601.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.